

BAB 8

MEWASPADAI ANCAMAN TERHADAP KEDUDUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. ANCAMAN TERHADAP INTEGRASI NASIONAL

1. **Ancaman Bidang Ideologi**, contohnya penyebaran paham komunisme yang masih mengancam kehidupan bangsa. Meskipun ideologi ini sudah dilarang.
2. **Ancaman Bidang Politik**, dapat terjadi dari pihak :
 - a. Luar : berupa intervensi, provokasi, intimidasi negara lain dalam mengganggu stabilitas politik
 - b. Dalam : gerakan masa untuk mengganggu stabilitas pemerintahan yang digerakan oleh oknum politik.
3. **Ancaman Bidang Ekonomi**, globalisasi ekonomi mengakibatkan persaingan produk dengan negara lain, eksistensi produk dalam negeri terganggu karena kalah saing dengan produk luar negeri.
4. **Ancaman Bidang Sosial Budaya**, terdiri dari :
 - a. Luar : munculnya budaya konsumtif, hedonisme, individualisme, westernisasi, lemahnya nilai keagamaan.
 - b. Dalam : isu kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, kemiskina.
5. **Bidang Pertahanan dan Keamanan**, biasanya ancaman militer, seperti : agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, teror, ancaman laut dan udara.

B. MENGATASI ANCAMAN TERHADAP INTEGRASI NASIONAL

1. **Bidang Ideologi dan Politik**, :
 - a. Mengembangkan demokrasi politik.
 - b. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
 - c. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
 - d. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - e. Menegakkan supremasi hukum.
 - f. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.
2. **Bidang Ekonomi**, dengan menumbuhkan sistem ekonomi kerakyatan,
 - a. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat.
 - b. Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri.
 - c. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat.
 - d. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.

- e. Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju.

3. Bidang sosial budaya,

- a. Pengaruh dalam, Pendidikan agama pengawasan/ pendidikan orangtua.
- b. Pengaruh luar, mewujudkan keseimbangan antara :
 - Manusia dengan tuhan
 - Manusia dengan alam
 - Manusia dengan masyarakat
 - Lahir dengan batin.

4. Bidang Pertahanan dan Keamanan, Pasal 30 ayat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- 3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut
- 4) dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- 5) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- 6) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan :

1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.